



**Pemerintah Daerah  
Kabupaten Banggai**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



**Rencana Kerja**  
Satuan Kerja Intansi Pemerintah  
**(RENJA - SKPD)**



**#Organisasi Berkualitas | Kerja Tuntas | Untuk Rakyat**

**Tahun 2020**



[bpbd.banggai@yahoo.com](mailto:bpbd.banggai@yahoo.com)

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Karunia yang limpahkan kepada kami sampai saat ini masih dapat menjalankan tugas sebagai amanah dan dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019. Adapun isi yang terkandung di dalam Rencana Kerja (RENJA) Instansi Pemerintah ini merupakan kebulatan kesepakatan bersama yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama pula oleh seluruh jajaran Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Banggai. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem penyusunan Rencana Kerja (RENJA) yang handal, demokratis, professional, efisiensi, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Penyampaian Rencana Kerja (RENJA) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (good governance) dan yang amanah. Selain itu merupakan rencana pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai sebagai penjabaran dari visi, misi dan perencanaan strategis yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan - kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Semoga Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan, program/ kegiatan dan merupakan perwujudan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020.

Luwuk, 2019

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Banggai



**Ir. H. RENSLY SAADJAD, MM**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP 19620317 199003 1 012

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB.I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB.II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM	
2.1 Target Pencapaian SPM	8
BAB.III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD	
3.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja	14
3.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD	14
3.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	17
3.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD TA. 2020	18
3.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan TA. 2020	18
BAB.IV TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN	
4.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	20
4.2 Tujuan & sasaran RENJA BPBD	20
4.3 Program dan Kegiatan RENJA BPBD	23
BAB.V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	34
5.2 Lampiran - Lampiran	35

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, antara lain mengamanatkan untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota wajib melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja OPD) sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra OPD).

Penyusunan Renja OPD Kabupaten Banggai diawali dengan perumusan rancangan awal RKPD Kabupaten Banggai untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam menyusun Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan paradigma penyusunan Renja sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sejalan dengan amanat undang-undang tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai sebagai lembaga lain yang mempunyai tugas dan fungsi pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi itulah diperlukan suatu dokumen rencana kerja yang menguraikan program dan kegiatan tahunan.

Adapun penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kabupaten Banggai Tahun 2020 dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas



## 1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kabupaten Banggai Tahun 2020 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47).
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2011 Nomor 20; tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 92);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 99);
  13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 110);

14. Peraturan Bupati Banggai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Banggai Nomor 37 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Banggai;
16. Peraturan Bupati Banggai Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 Nomor 2448);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan dan menjadi acuan bagi konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun, tujuan penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi acuan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020;
2. Menyediakan arahan bagi aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai dalam mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
3. Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun 2020.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai terdiri dari 4 (empat) bab yang dapat diuraikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:



**Bab I   Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**Bab II   Penerapan dan Pencapaian SPM**

- 2.1. Taget Pencapaian SPM

**Bab III   Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Kab. Banggai**

- 3.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja
- 3.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD
- 3.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 3.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD TA. 2018
- 3.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan TA. 2018

**Bab.IV   Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**

- 4.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018.
- 4.3. Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018.

**Bab IV   Penutup****Lampiran-Lampiran**

## BAB II

### PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

#### A. Bidang Urusan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai merupakan Lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Banggai, yang mendukung di *Bidang urusan Sosial*.

#### B. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis - jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah Kabupaten Banggai, yakni :

- **Pecegahan Mitigasi dan Kesiapsiagaan**
  1. Penyuluhan dan Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat tentang Bahaya Bencana.
  2. Pembentukan dan Peembangan Desa Tangguh Bencana.
- **Rehabilitasi dan Rekonstruksi**
  1. Perbaikan Daerah Rawan Bencana
- **Kedaruratan dan Logistik**
  1. Penanganan Tanggap Darurat
  2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar tentang Sandang Pangan dan Papan bagi Korban Bencana Alam

**C. TARGET PENCAPAIAN SPM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI**

No	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN
		Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Pecegahan Mitigasi dan Kesiapsiagaan</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyuluhan dan Peningkatan Kewaspadaan tentang Bahaya Bencana</li> <li>• Pembentukan Desa Tangguh Bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Peserta Penyuluhan</li> <li>• Jumlah Desa Tangguh Bencana</li> </ul>	350 Org	-	100 org	100 org	175 org
			0 Desa	1 Desa	3 Desa	4 Desa	4 Desa
2.	<b>Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan Daerah Rawan Bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Infrastruktur perbaikan</li> </ul>	59%	30%	33%	33%	33%
3.	<b>Kedaruratan dan Logistik</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanganan Tanggap Darurat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Respon time penanganan</li> </ul>	3 Jam	2,2 Jam	2,2 Jam	2,2 Jam	2,2 Jam
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan Kebutuhan Dasar tentang Sandang Pangan dan Papan bagi Korban Bencana Alam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Sandang Pangan dan Papan</li> </ul>	40%	80%	85%	90%	90%

**D. REALISASI**

No	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL	TAHUN (n-1)	KET
		Indikator	2018	
1	2	3	4	5
1.	<b>Pecegahan Mitigasi dan Kesiapsiagaan</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyuluhan dan Peningkatan Kewaspadaan tentang Bahaya Bencana</li> <li>• Pembentukan dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Peserta Penyuluhan</li> <li>• Jumlah Desa Tangguh Bencana</li> </ul>	80 %	-

2.	<p><b>Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan Daerah Rawan Bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Kegiatan Perbaikan</li> </ul>	80%	
3.	<p><b>Kedaruratan dan Logistik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penanganan Tanggap Darurat</li> <li>Pemenuhan Kebutuhan Dasar tentang Sandang Pangan dan Papan bagi Korban Bencana Alam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Kegiatan Penanganan</li> <li>Jumlah Bantuan Kebutuhan Dasar</li> </ul>	80%	

Pada table tersebut diatas, maka rata-rata persentase realisasi SPM pada tahun 2016 adalah 80% dari target capaian SPM tahun 2016.

#### E. ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2020

No	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL	APBD	SUMBER LAIN YANG SAH
1	2	Indikator	(Rp)	5
1.	<p><b>Pecegahan Mitigasi dan Kesiasiagaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyuluhan dan Peningkatan Kewaspadaan tentang Bahaya Bencana</li> <li>Pembentukan Desa Tangguh Bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Peserta Penyuluhan</li> <li>Jumlah Desa Tangguh Bencana</li> </ul>	<p>495.000.000</p> <p>55.000.000</p> <p>440.000.000</p>	
2.	<p><b>Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan Daerah Rawan Bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Infrastruktur Perbaikan</li> </ul>	<p>771.000.000</p> <p>771.000.000</p>	

3.	<b>Kedaruratan dan Logistik</b>		<b>165.000.000</b>	
	• Penanganan Tanggap Darurat	• Jumlah Kegiatan Penanganan	85.000.000	
	• Pemenuhan Kebutuhan Dasar tentang Sandang Pangan dan Papan bagi Korban Bencana Alam	• Jumlah Bantuan Kebutuhan Dasar	80.000.000	

#### F. DUKUNGAN PERSONIL

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan SPM.

- a. Aparatur Sipil Negara : 30
- b. Non Aparatur Sipil Negara : 22

#### G. Permasalahan dan Solusi

##### \* Permasalahan

- SDM pelayanan masih belum memenuhi standarisasi pelayanan
- Jumlah Personil dalam penerapan SPM masih sangat kurang
- Sarana dan prasarana yang belum memadai baik dari kualitas dan kuantitas.

##### \*Solusi

- Mengikutsertakan personil ke pelatihan – pelatihan / diklat standarisasi pelayanan dalam pekerjaan dan masyarakat
- Mengusulkan tambahan personal/pegawai ke Badan Kepegawaian Daerah
- Meningkatkan / penambahan pengadaan sarana dan prasarana

#### PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal ( SPM ).

No	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3
1.	Pecegahan Mitigasi dan Kesiapsiagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyuluhan dan Peningkatan Kewaspadaan tentang Bahaya Bencana.</li> <li>• Pembentukan Desa Tangguh Bencana.</li> </ul>
2.	Rehabilitasi dan Rekonstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan Daerah Rawan Bencana</li> </ul>
3.	Kedaruratan dan Logistik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanganan Tanggap Darurat.</li> <li>• Pemenuhan Kebutuhan Dasar tentang Sandang Pangan dan Papan bagi Korban Bencana Alam.</li> </ul>

### BAB III

#### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

#### BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANGGAI

##### 3.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 s/d Tahun 2021.

Sebagai dokumen perencanaan daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan Renja-OPD dilakukan sebagai penjabaran dari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) OPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Untuk itu dalam proses penyusunan Renja-OPD tidak berdiri sendiri melainkan perlu dilakukan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) tahun sebelumnya dan review capaian Rencana Strategi (Rensta) OPD yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan organisasi perangkat daerah baik dalam melaksanakan program dan kegiatannya

maupun dalam pencapaian target kinerja yang bersifat *outcome* atau manfaat dan *output* atau hasil.

### **3.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.**

Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu tahapan dalam proses pembangunan. Perencanaan akan menghasilkan rencana yang selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu pembangunan, oleh karena itu dalam menyusun perencanaan pembangunan hendaknya diperhatikan indikator kinerja kunci dan berbagai faktor yang kemungkinan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan.

Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaian kinerjanya dengan menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/k.

Keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja Perangkat Daerah. Pencapaian kinerja, sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran setiap misi OPD.

Adapun misi OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Banggai, sebagai berikut :

1. Misi Pertama ;

- Membangun Sistem Penanggulangan Bencana yang Terpadu dan Berkelanjutan.

2. Misi Kedua :

- Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh dalam menghadapi bencana.
- Mewujudkan lembaga Penanggulangan Bencana yang Tangguh.
- Meningkatkan Kinerja Lembaga Penanggulangan Bencana.



**Tabel 3. 2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Kabupaten Banggai**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK/IKU	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi capaian Tahun					Proyeksi Tahun Ke-5
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Jumlah Masyarakat/aparat ur yang mendapat pelatihan Penanggulangan Bencana	Cakupan wilayah yang berkurang resiko bencana	Kab. Banggai	3 Keg	2 Keg	5 Keg	5Keg	6 Keg	80%	85%	90%	0%	0%	100%
2.	Terlaksananya kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah Bencana	Cakupan jumlah persentasi kerusakan/kerugian masyarakat pasca bencana	Kab. Banggai	1 Keg	1 Keg	4 Keg	4 Keg	4 Keg	80%	85%	90%	0%	0%	100%
3.	Terlaksananya Pelayanan Tanggap Darurat	Cakupan persentasi korban bencana skala kabupaten yang tertangani pada saat tanggap darurat	Kab. Banggai	4 Keg	4 Keg	4 Keg	4 keg	4 Keg	80%	85%	90%	0%	0%	100%

### **3.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai.**

#### **3.3.1 Isu-isu Strategis**

Tolak ukur penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD kaitannya rencana kerja yang akan dirumuskan tentunya tidak lepas dari isu-isu strategis yang akan dihadapi oleh OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2018 mendatang, adapun isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Perlu adanya kepedulian pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan bencana.
2. Keterlambatan penanganan pencegahan / pemulihan terhadap penanggulangan bencana.
3. Peningkatan kapasitas SDM dalam upaya kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

#### **3.3.2 Rendahnya Kemampuan Aparatur**

Dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia, kondisi kepegawaian dan tingkat pendidikan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai saat ini masih perlu ditingkatkan, untuk dapat mengurangi beberapa permasalahan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah antara lain sebagai berikut :

1. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya;
2. Belum dilakukan Perencanaan SDM dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan belum adanya langkah –langkah tertentu guna menjamin bahwa bagi institusi Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan, dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Kesemuanya itu dalam rangka mencapai tujuan dan berbagai sasaran yang telah dan akan ditetapkan.

3. Belum efektifnya pembagian tugas pokok kepada setiap staf administrasi untuk menunjang kinerja setiap sub bagian dan sub bidang di setiap unit organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai;
4. Masih kurangnya tenaga staf yang profesional, baik itu menterjemahkan, merumuskan, dan menganalisis data dengan baik, guna menunjang kelancaran tugas pimpinan;
5. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.

### **3.3.3 Rendahnya Kualitas Pelayanan OPD**

Berdasarkan fungsi pelayanan OPD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai saat ini diperhadapkan pada beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan sinkronisasi Program Penanggulangan Bencana dengan Perangkat Daerah yang terkait.
2. Belum terpenuhinya kajian resiko bencana di daerah.
3. Belum terpenuhinya jumlah petugas SATGAS BPBD dan Penganggaran operasional bagi petugas SATGAS Penanggulangan Bencana di Daerah.

### **3.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020**

Penyusunan dokumen rencana tahunan dilakukan melalui proses kunjungan langsung kewilayah rawan bencana sehingga menghasilkan program dan kegiatan yang dituangkan kedalam Rencana Kerja 2020 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai.

### **3.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2020.**

Proses Penanggulangan Bencana Daerah tidak dapat dipisahkan dari bentuk pelayanan kepada masyarakat dan menjadi ritme strategis dalam keberhasilan seluruh program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Karena itu upaya untuk memperkuat dan menciptakan

masyarakat yang tangguh dalam penanggulangan bencana merupakan langkah dalam mempersiapkan masyarakat yang mengerti tentang upaya penanggulangan bencana.

Dalam kaitan itu, terdapat beberapa permasalahan yang sedang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yaitu :

1. Sumber daya manusia yang tersedia belum mendapat pelatihan pada masing – masing jenis penanggulangan Bencana.
2. Sarana dan prasarana pendukung dalam hal penanggulangan bencana yang belum memadai.
3. Tokoh masyarakat (Steakholder) belum sepenuhnya mendukung dalam hal program penanggulangan bencana.
4. Kesadaran masyarakat rawan bencana belum sepenuhnya mengerti upaya – upaya penanggulangan bencana.
5. Fungsi koordinasi yang belum berjalan secara optimal.

Keberhasilan dalam melakukan program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Banggai tergantung pada dukungan pemerintah daerah dan pusat.

Sehubungan dengan itu, untuk penyempurnaan proses Penanggulangan bencana Tahun 2020 terdapat beberapa inovasi yaitu : (a) Pemanfaatan kemampuan masyarakat melalui kearifan lokal dalam menghadapi segala resiko bencana. (b) Optimalisasi pengendalian dan penanggulangan bencana.(c) Kemampuan dalam menghadapi meminimalisir akibat terjadinya bencana.(e) Pemantapan komunikasi publik dan Stakeholders tentang penanggulangan bencana. f) Pemantapan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Motivator, Koordinator, Administrator serta Agen Perubahan dalam pelaksanaannya.

## **BAB IV**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **4.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2018 berada pada tahap jangka menengah yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan visi untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR.

Untuk menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal). Di samping itu juga penelaahan mengenai pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai

#### **4.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020**

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan dan akan dicapai, adalah sebagai berikut:

##### **1. Tujuan**

- a. Memantapkan kompetensi dan kapabilitas aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sebagai lembaga koordinasi yang handal, Badan Penanggulangan Bencana Daerah terus meningkatkan kinerjanya. Dengan menjadikan organisasi pembelajaran dalam semua aspek termasuk penerapan *good governance* dan *clean government*. Untuk melaksanakan perannya tersebut maka peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh insan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. akan terus dipacu mengingat Penanggulangan Bencana yang dinamis, efektif dan efisien sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur pelaksanaannya.

b. Memantapkan manajemen pelayanan Penanggulangan Bencana.

Sebagai Instansi pemerintah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Banggai. memiliki tugas memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat terutama dalam penanggulangan Bencana Kab. Banggai karena itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan.

c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penanggulangan Bencana.

Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pelayanan dan penanggulangan bencana, maka perlu adanya pengelolaan sumber daya yang secara efisien dan efektif pula. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten.

d. Memantapkan sistem pengelolaan data dan informasi penanggulangan bencana.

Terorganisirnya basis data dan informasi penanggulangan bencana daerah merupakan salah satu prioritas program ke depan, sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah. dan pemangku kepentingan lainnya akan lebih mudah untuk mengakses, mencari dan mengungkapkan data dan informasi sebagai input dalam proses

penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan terus pula melakukan segala upaya untuk menjamin penanggulangan bencana dan hasil kajian strategik penanggulangan tidak saja berdaya guna dan berdaya hasil bagi penentu kebijakan tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh *stakeholders* dan publik.

## 2. Sasaran

a. Memantapkan aparatur yang berkompeten dan berkapabilitas maka OPD harus lebih mendukung meningkatnya kemampuan SDM Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang sarasanya dapat dijabarkan, yaitu :

- Lancarnya administrasi kelembagaan OPD
- Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
- Optimalnya pelaksanaan pendidikan, pelatihan, bimtek serta sosialisasi perundang-undangan terkait penanggulangan bencana.

Sebagai tolak ukur untuk Meningkatkan Pelayanan Penanggulangan Bencana, yang bertujuan untuk pelaksanaan pemerataan penanganan bencana alam dengan seimbang jumlah petugas SATGAS/TRC yang berkompeten dalam memberikan pelayanan tanggap darurat dengan indikator sasaran sebesar 85 %.

b. Memantapkan manajemen pelayanan penanggulangan bencana, maka OPD tentunya harus menetapkan standar dan protap dalam memberikan penanganan bencana terkait mutu pelayanan yang cepat, tepat dan efisien, sasaran tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal terkait penanggulangan bencana.
- Koordinasi penyusunan perencanaan pencegahan dan penanggulangan bencana.
- Keterpaduan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana yang melibatkan beberapa instansi terkait.

Terlaksananya penanganan tanggap darurat yang bermanfaat untuk memberikan perlindungan, rasa aman kepada korban bencana

alam secara cepat, tepat dan efektif, dengan indikator sasaran yaitu Tingkat Pelayanan kepada masyarakat sebesar 80 %.

- c. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi proses penanggulangan bencana, sehingga OPD perlu merencanakan secara tepat baik dari segi anggaran maupun program yang akan dilaksanakan, maka sasarannya dapat dijabarkan sebagai berikut :
- Meningkatnya keterpaduan program dan anggaran.
  - Optimalnya pengelolaan sumberdaya bantuan bencana tepat sasaran.
- d. Memantapkan sistem pengelolaan data dan informasi penanggulangan bencana, maka OPD perlu meningkatkan penyediaan data yang seinformatif mungkin kepada aparat OPD, masyarakat dan lembaga usaha serta instansi terkait, sehingga sasarannya dapat dijabarkan sebagai berikut :
- Meningkatnya penguasaan teknologi di bidang penanggulangan bencana.
  - Tersusunnya informasi daerah rawan bencana yang mudah diakses oleh masyarakat.
  - Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat menghadapi ancaman dan resiko bencana.

Terpenuhinya kebutuhan dasar tentang sandang, pangan dan papan bagi korban bencana alam pada pelaksanaan pelayanan masyarakat, dengan indikator sasaran yaitu pemenuhan kebutuhan dasar tentang sandang pangan dan papan dalam upaya penanggulangan bencana sebesar 85 %.

#### **4.3 Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020**

Program dan kegiatan adalah ritme tahapan untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, Program/kegiatan prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka pencapaian sasaran



strategis masuk ke dalam prioritas kebijakan daerah yang berkaitan dengan bidang Penanggulangan Bencana adalah *tujuan bersama*.

### 1. Usulan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2020

Disamping program/kegiatan prioritas tersebut diatas diperlukan program-program penunjang yang merupakan dukungan mendasar untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pemenuhan belanja tetap dan mengikat SKPD serta kegiatan yang bersifat sektoral dan rintisan. Adapun uraian Program dan Kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4.3**  
**PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2020**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BANGGAI**

NO.	Program/Kegiatan/Pekerjaan	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Ket
I.	<b>Program Pencegahan Mitigasi dan Kesiapsiagaan</b> ➤ Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana			
1.	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	- Lobu - Toili - Nuhon - Bualemo	- Balean - Rusa Kencana - Tobelombang - Sampaka	Renja OPD Renja OPD Musrenbang Renja OPD
II.	<b>Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b> ➤ Kegiatan Perbaikan daerah Rawan Bencana.			
1.	Pembangunan Tanggul/Revetment Pengaman Sungai	- Balantak Utara - Toili - Toili Barat	- Pangkalaseang - Sentral Sari - Kamiwangi	Proposal Desa Proposal Desa Usulan Desa
III.	<b>Program Kedaruratan dan Logistik</b> ➤ Kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Korban Bencana Alam.			
1.	Pengadaan Perahu Karet	- Batui Selatan - Batui Selatan	- Bahari Makmur - Suka Maju	Musrenbang Musrenbang

Kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kab. Banggai pada tahun 2020 sebagian besar merupakan hasil musrenbang dan usulan yang direncanakan oleh OPD. Untuk mewujudkan usulan kegiatan tersebut perlu adanya dukungan dari Pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat.

## **2. Program dan Kegiatan Tahun 2020**

Sebagai wujud dari kinerja OPD yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 Program dan Kegiatan yang telah direncanakan oleh BPBD Kab. Banggai yang terdiri dari 11 (sebelas) program dan 54 (Lima puluh Empat) kegiatan, antara lain sebagai berikut :

### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini memiliki 12 (dua belas) kegiatan, antara lain:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional.
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
- Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- Penyediaan Makanan dan Minuman.
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.
- Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran.

### **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**

Program ini memiliki 9 (Sembilan), yaitu :

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional.
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
- Pengadaan Meubelair.

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  - Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional.
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
  - Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor.
  - Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan Listrik.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- Program ini memiliki 2 (dua) kegiatan, yaitu :
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
  - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.
4. Program Faslitasi Pindah/Purna Tugas PNS
- Program ini memiliki 1 (Satu) kegiatan, antara lain :
- Pemulangan Pegawai yang Pensiun.
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- Program ini memiliki 2 (Dua) kegiatan, antara lain :
- Pendidikan dan Pelatihan Formal.
  - Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur.
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- Program ini memiliki 6 (enam) kegiatan, yaitu :
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
  - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.
  - Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun.
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD.
  - Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah.
  - Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD).
7. Program Pengembangan Sistem Informasi/Data.
- Program ini memiliki 2 (Dua) kegiatan, yaitu :
- Pemuktahiran Sistem Informasi Data Base.
  - Penyusunan Profil Perangkat Daerah.
8. Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan.
- Program ini memiliki 1 (Satu) kegiatan, antara lain :

- Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

#### 9. Program Pencegahan Mitigasi dan Kesiapsiagaan.

Program ini memiliki 7 (Tujuh) kegiatan, yaitu :

- Penyuluhan dan Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat Terhadap Bencana.
- Koordinasi Dukungan Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pra Bencana.
- Pembentukan dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana.
- Survey dan Monitoring Wilayah Rawan Bencana.
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Mitigasi Bencana.
- Penyusunan Dokumen Kajian Risiko, Informasi dan SOP Penanggulangan Bencana.
- Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi, Komunikasi dan Data Kebencanaan.

#### 10. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Program ini memiliki 4 (Empat) kegiatan, yaitu :

- Perbaikan Daerah Rawan Bencana.
- Pemulihan Sosial Ekonomi Pasca Bencana.
- Monitoring dan Evaluasi Kerusakan Pasca Bencana.
- Peningkatan Kapasitas Pengkajian dan Penilaian Kebutuhan Pasca Bencana.

#### 11. Program Kedaruratan dan Logistik.

Program ini memiliki 8 (Delapan) kegiatan, yaitu :

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk Dari Ancaman Korban Bencana Alam.
- Penanganan Tanggap Darurat.
- Pemenuhan Kebutuhan Dasar tentang Sandang Pangan dan Papan bagi Korban Bencana Alam.
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman Korban Bencana Alam.
- Simulasi Penanggulangan Bencana.
- Peningkatan Layanan Penanggulangan Bencana.
- Koordinasi Dukungan Kegiatan Kedaruratan dan Logistik.

- Penguatan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana.

### 3. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran

#### a. Program Administrasi Perkantoran

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SASARAN
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	Materai
2.	Penyediaan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jaringan Listrik, TV kabel dan Internet	Internet, Air, Listrik
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah	STNK
4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Petugas Kebersihan Kantor
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Alat-alat instalasi Listrik/ Penerangan
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9.	Penyediaan makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat
10.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rakor Ke Luar daerah
11.	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Honorrarium Jasa Administrasi Perkantoran
12.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Perjalanan Dinas Dalam Daerah

#### b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SASARAN
1.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Gedung Kantor BPBD
2.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor BPBD
3.	Pengadaan Meubelair	Terlaksananya Pengadaan Meubelair	Meubelair Kantor BPBD
4.	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Service Kendaraan Dinas/Operasional BPBD
5.	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jasa Service Perlengkapan Gedung Kantor BPBD
6.	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jasa Service Peralatan Gedung Kantor BPBD

#### c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SASARAN
----	----------	-------------------	---------

1.	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Pakaian Kerja Lapangan
2.	Pengadaan Pakaian Dinas Hari-hari Tertentu	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Hari-hari Tertentu	Pakaian Olahraga BPBD

#### d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SASARAN
1.	Pembinaan dan Pemantauan Kinerja Aparatur	Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Kinerja Aparatur	Pembinaan Kinerja Pegawai BPBD

#### e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SASARAN
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan LAKIP, TEPR
2.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
3.	Penyusunan Laporan Keuangan Prognosis	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Prognosis	Dokumen Laporan Keuangan Prognosis
4.	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
5.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, RKPA, DPPA, SIRUP
6.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monev Kegiatan BPBD

#### h. Program Perencanaan Umum

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SASARAN
1.	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Provinsi, Musrenbang Nasional

#### h. Program Pencegahan Mitigasi dan Kesiapsiagaan

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SASARAN
1.	Monitoring Wilayah Rawan Bencana	Terlaksananya Monitoring Wilayah Rawan Bencana	Monev Wilayah Rawan Bencana
2.	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Terlaksananya Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Des Tangguh Bencana
3.	Pengadaan Rambu Peringatan Rawan Bencana	Terlaksananya Pengadaan Rambu Peringatan Rawan Bencana	Rambu Peringatan Rawan Bencana
4.	Koordinasi Dukungan Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pra Bencana	Terlaksananya Koordinasi Dukungan Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pra Bencana	Kegiatan Rakor Teknis Pencegahan dan Kesiapsiagaan Se-Sulawesi Tengah

5.	Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana, Informasi dan SOP Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana, Informasi, SOP	Wilayah Rawan Bencana di Kab. Banggai
6.	Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi, Komunikasi dan Data Kebencanaan	Jumlah Pengembangan Aplikasi Kebencanaan	Aplikasi SIPPINA (Sistem Informasi Pengelolaan Pengaduan Bencana Berbasis Android)
7.	Penyuluhan dan Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat Terhadap Bencana	Jumlah Peserta Penyuluhan Peningkatan Kewaspadaan Bencana	Masyarakat diwilayah Rawan Bencana

### i. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SASARAN
1.	Perbaikan Daerah Rawan Bencana	Terlaksananya Perbaikan Daerah Rawan Bencana	Daerah Rawan Bencana
2.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Monev Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
3.	Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana	Jumlah Masyarakat yang dipulihkan Pasca Bencana	Masyarakat (KK) yang terkena dampak pasca bencana
4.	Peningkatan Kapasitas Pengkajian dan Penilaian Kebutuhan Pasca Bencana	Jumlah Pelaksanaan JITUPASNA	Tim JITUPASNA BPBD Kab. Banggai

### j. Program Kedaruratan dan Logistik

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SASARAN
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman Korban Bencana Alam	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman Korban Bencana Alam	Saran dan Prasarana Evakuasi
2.	Penanganan Tanggap Darurat	Terlaksananya Penanganan Tanggap Darurat	Masyarakat Korban Bencana
3.	Pemenuhan Kebutuhan Dasar tentang Sandang Pangan dan Papan bagi Korban Bencana Alam	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Dasar tentang Sandang Pangan dan Papan bagi Korban Bencana Alam	Masyarakat Korban Bencana Alam
4.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman Korban Bencana Alam	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman Korban Bencana Alam	Pemeliharaan Saran dan Prasarana Evakuasi korban bencana
5.	Simulasi Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Simulasi Penanggulangan Bencana	Pesrta Simulasi, Masyarakat,
6.	Peningkatan Layanan Penanggulangan Bencana	Jumlah Honor Tim Reaksi Cepat (TRC)	TRC BPBD Kab. Banggai
7.	Koordinasi Dukungan Kegiatan Kedaruratan dan Logistik	Jumlah Kegiatan Dukungan Koordinasi Kedaruratan dan Logistik	Koordinasi Bantuan Kedaruratan dan Logistik
8.	Penguatan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana	Jumlah Anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dibentuk	TRC BPBD Kab. Banggai

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020, merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Tahun 2020. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Renja tahun 2020 sebagai dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2020.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2020 dengan efektif dan efisien.
2. Renja Tahun 2018 Sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2020, dimana Renja Tahun 2020 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2020, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2020.
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2018 mengacu pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah.



5. Renja Tahun 2020 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

# **Lampiran-Lampiran**

---